



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDRIZAL
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
3. NHK : 124884

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/61 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 358.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT DELUXE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 98.140.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 136.567.625

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.192.707.625

III. HUTANG Rp. 279.857.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.912.850.625

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.